



**Kepentingan Negara dalam *Peacekeeping Operations* PBB
di Darfur tahun 2008-2017**

Nindya Kartika Sari

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The conflict in Darfur broke out in 2003 which was accompanied by a series of crimes against humanity that threatened civilians in Darfur, in 2007 the UN passed a resolution containing a deployment of the UN's hybrid peacekeeping mission join forces with the African Union called UNAMID, which until 2017 UNAMID failed in carrying out its mission. This study aims to analyze the causes of Peacekeeping Operations failures in Darfur in the range of 2008-2017, this research uses Realism theory to explain the concept of state interests that are the cause of failure in Peacekeeping Operations in Darfur, the results of this study indicate UNAMID's failures caused by the UN's lack of political will and the lack of attention from UN Security Council member countries such as the US, UK, and France in imposing strict sanctions and policies on Sudan as perpetrators of humanitarian crimes in Darfur, the results also indicate the interests of other UNSC members as the reason of failure in UNAMID, namely Russia and China which support the government of Sudan and they often sabotaged the peace mission process in Darfur, which the UN does not take firm action against.

Keywords: Darfur Conflict, UNAMID, UN, Failure, Realism, State Interest.

Pendahuluan

Pada tanggal 25 April 2003, *Sudan Liberation Army* atau SLA, kelompok pemberontak Darfur, menyerang pangkalan udara pemerintah Sudan di El Fasher, ibukota negara bagian Darfur Utara, serangan ini terjadi karena warga Darfur merasa Pemerintah Sudan menekan warga non-Arab yang mendominasi Darfur, serangan ini menghancurkan Antonov Bombers, senjata helikopter milik pemerintah Sudan, para pemberontak juga berhasil menyita sejumlah besar amunisi dan senjata berat, bagi pemerintah Sudan hal ini merupakan kekalahan besar, serangan juga dilakukan oleh JEM atau *Justice Equality Movement* kelompok pemberontak Darfur lainnya. Pemerintah Sudan membalas serangan ini dengan kekuatan militer untuk menekan pemberontak (Amnesti Internasional 2012).

Disaat yang bersamaan muncul kelompok militan yang bernama Janjaweed yang meneror masyarakat Darfur, menyerang desa dan membantai penduduk sipil, presiden Darfur Omar Al-Bashir sendiri membantah keterlibatan pemerintah dengan Janjaweed, namun komunitas internasional berpikir sebaliknya, Janjaweed sendiri bukan sekedar 'perampok atau penjahat' seperti yang di klaim oleh Presiden Bashir, Janjaweed disokong oleh senjata dan alat modern seperti helikopter, mobil baja, yang mana dicurigai disponsori oleh Pemerintah Sudan (Adenauer 2006), Human Rights Watch (2007) mengatakan bahwa Janjaweed mendapat perintah langsung dari pemerintah Sudan untuk mengontrol pemberontakan yang muncul di Darfur. Janjaweed biasanya beroperasi dengan membunuh laki-laki, memperkosa

perempuan dan membunuh atau menculik anak-anak, yang mana banyak menimbulkan keresahan dan korban jiwa di Darfur (Adenauer 2006).

Konflik Darfur memanas tahun 2003 ketika kelompok pemberontak menyerang pangkalan udara Pemerintah di El Fasher, sejak saat itulah konflik di Darfur semakin berkejolak, namun sesungguhnya, konflik Darfur ini dapat dilihat dari sejarah sejak masa kolonialisme Sudan dimana terdapat perpecahan etnis, kekerasan, dan marginalisasi sosial, politik, ekonomi yang mengakibatkan munculnya sentimen arab dan non arab yang menimbulkan konflik di Darfur. PBB sendiri menyebut krisis kemanusiaan di Darfur sebagai yang terburuk di Dunia, US sendiri menyebut keadaan di Darfur sebagai genosida.

Uni Afrika mulai terlibat dalam penyelesaian konflik Darfur setelah presiden negara Chad yaitu Idriss Deby membuka negosiasi dengan para pemberontak, perjanjian ini ditandatangani juga oleh SLA dan dikenal sebagai perjanjian Abeche yang diadakan tahun 2003, perjanjian ini kemudian diambil alih oleh Uni Afrika, hasil akhir perjanjian ini adalah Perjanjian Perdamaian Darfur atau *Darfur Peace Agreement*, namun ternyata adanya negosiasi dan perjanjian ini masih belum bisa menyelesaikan konflik, selanjutnya babak perjanjian kedua dimulai pada tahun 2004 dibawah pengawasan Uni Afrika di Abuja, Nigeria, di dalam perjanjian ini mulai dibahas keberadaan AMIS atau *Africa Union Mission in Sudan* pada konflik Darfur, pada 8 April 2004 Uni Afrika memutuskan untuk menurunkan AMIS pada konflik Darfur, AMIS sendiri sebenarnya hanya diotorisasikan untuk memonitori gencatan senjata dengan jumlah personel 150 orang pasukan Rwanda, 150 pasukan dari Nigeria dan tambahan 600 pasukan, namun AMIS sendiri tidak memiliki mandat yang kuat, karena keadaan konflik Darfur yang tidak juga mereda Uni Afrika melakukan perubahan melalui AMIS II dengan menambah personel pasukan perdamaian menjadi 7000 pasukan perdamaian (ISS 2007).

Walaupun sudah dilakukan penambahan pasukan dengan AMIS II konflik di Darfur tidak juga mereda, International Crisis Group (2005) mengatakan bahwa untuk wilayah Darfur idealnya seharusnya memiliki setidaknya 12.000-15000 pasukan perdamaian, AMIS dikritisi lambat dalam menjalankan misinya dan AMIS sendiri juga terbatas ruang geraknya, AMIS hanya dapat melindungi warga dan melakukan observasi militer, dan tidak dapat secara langsung terlibat dalam konflik, AMIS juga disebut-sebut terbatas dalam sumber daya manusianya serta terbatas dalam persenjataan dan infrastruktur, pada 2005 AMIS mengalami kemunduran dana sebanyak US \$173 juta dan terus saja mengalami defisit.

Gagalnya Uni Afrika dalam menghentikan konflik dan mengembalikan kedamaian di Sudan akhirnya membuat PBB turun tangan dalam menurunkan pasukan penjaga perdamaian, dengan berkolaborasi bersama Uni Afrika, maka lahirlah UNAMID, resmi ditetapkan oleh Dewan Keamanan pada tanggal 31 Juli 2007 melalui penerapan resolusi 1769, di bawah Bab VII Piagam PBB. UNAMID sendiri secara resmi mengambil alih dari AMIS pada tanggal 31 Desember 2007.

Namun terjunnya PBB dalam misi perdamaian di Darfur ternyata belum bisa mengembalikan perdamaian di Darfur, UNAMID yang merupakan gabungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Otonomi yang paling tinggi di dunia dan bersama Uni Afrika yang juga merupakan organisasi perserikatan terbesar di Afrika dengan mandatnya yang diturunkan tahun 2007 sampai pada 2017 masih gagal dalam tugas utamanya melindungi warga sipil di Darfur. Darfur masih jauh dari aman apalagi dengan adanya penyerangan di desa-desa yang menimbulkan banyak korban yang berjatuh, pelanggaran HAM pada warga sipil, IDP yang tidak kunjung kembali ke asalnya, konflik yang masih berjalan belum bisa teratasi, adalah bukti-bukti dari kegagalan UNAMID mengembalikan perdamaian di Darfur.

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan penyebab kegagalan-kegagalan UNAMID dengan menggunakan teori Realisme untuk menjabarkan kepentingan negara yang

menghambat misi perdamaian di Darfur, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang hubungan internasional mengenai kepentingan negara dalam *Peacekeeping Operations* PBB di Darfur.

Pembahasan

Dalam hubungan internasional sendiri, negara berperilaku rasional dengan mengedepankan kepentingan nasionalnya, jadi segala sesuatu yang dilakukan negara dalam hubungan internasional bertujuan untuk mengejar kepentingan utama yang membentuk *power* (Dugis 2016). Realis sangat skeptis terhadap organisasi internasional dan memandang bahwa organisasi internasional tidak efektif, Realist juga mempertanyakan otoritas mereka. Kelemahan dari Organisasi internasional adalah fakta bahwa politik internasional terus dicirikan oleh sebuah pencarian kekuasaan dan kepentingan di antara semua negara, oleh karena pencarian kepentingan inilah tidak akan bisa tercapainya harmoni kepentingan bersama, yang menjadikan organisasi internasional sulit berkembang menjadi badan yang signifikan, Neack (1995) berpendapat bahwa interpretasi realis lebih baik menjelaskan partisipasi negara (pada organisasi internasional), penjelasan realis mengenai partisipasi negara dalam menjaga perdamaian PBB adalah bahwa negara melakukan apapun yang mereka bisa, dengan menggunakan seluruh sumber daya dan kekuatan mereka, untuk melindungi kepentingan nasional mereka.

Kaum realis menggunakan keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara sebagai dasar normatif penyebaran doktrin dan pengambilan kebijakan luar negerinya. Pandangan umum dari Realis adalah bahwa Negara adalah aktor utama di dunia internasional yang bergerak untuk tujuan keamanan termasuk mempertegas kekuatannya dengan berbagai cara, dunia ini dipandang Realist sebagai anarki, sehingga keberadaan IGO seperti PBB dinilai tidak relevan, apalagi dengan adanya *Peacekeeping Operations*, Mereka skeptis tentang organisasi internasional, baik IGO dan NGO. Realis tidak menaruh banyak kepercayaan pada PBB. Sebagian besar IGO yang ada berdiri untuk memenuhi kepentingan negara, bahwa negaralah yang mendirikan mereka, negara juga yang memberikannya kewenangan. Realist tidak mempercayai adanya PKO sebagai ‘penjaga perdamaian’ melainkan sebagai dominasi Negara-negara pemeliharaan perdamaian dan mungkin akan terus melakukannya sebagai sarana untuk mengendalikan sistem masyarakat internasional (Neack 1995). Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Statecraft dan kepentingan nasional realist dalam penelitian mengenai Kepentingan Negara dalam *Peacekeeping Operations* di Darfur.

Kegagalan AMIS dalam membawa kedamaian di Darfur membawa tekanan tersendiri bagi PBB untuk tidak mengulang hal yang sama, konflik Darfur yang tak kunjung reda dan juga sorotan internasional yang mulai tertuju pada Darfur akhirnya membuat PBB mengeluarkan pasukan perdamainnya, berbeda dengan pasukan perdamaiannya sebelumnya, UNAMID merupakan dimensi baru dari *peacekeeping operations*, yaitu menggabungkan dua lembaga antara PBB dan Uni Afrika hingga melahirkan *hybrid mission* yang juga merupakan bentuk evolusi dari generasi kelima *peacekeeping operations*. Otorisasi awal untuk misi ini sendiri diberikan oleh Dewan Keamanan PBB lewat resolusi 1769 pada tanggal 31 Juli 2007, otorisasi misi diperluas hingga tahun 2017 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1828 tahun 2008, Resolusi 1881 tahun 2009, Resolusi 1935 tahun 2010, Resolusi 2003 pada tahun 2011, dan Resolusi 2063 tahun 2012, Resolusi 2113 Tahun 2013, Resolusi 2173 tahun 2014, Resolusi 3228 tahun 2015, Resolusi 2296 tahun 2016, dan Resolusi 2363 tahun 2017. Resolusi Dewan Keamanan 2113 tanggal 30 Juli 2013 memperpanjang mandat UNAMID selama 13 bulan - sampai 31 Agustus 2014 ,tetapi kali ini mengurangi jumlah personil menjadi 16.200 personil militer, tahun selanjutnya, mandat tersebut diperpanjang lagi sampai 30 Juni 2015 (resolusi Dewan Keamanan 2173 pada tanggal 27 Agustus 2014), Resolusi

Dewan Keamanan 2228 tanggal 29 Juni 2015 sendiri mengurangi kembali jumlah pasukan menjadi 15.845 personil militer, misi ini terus mengalami perpanjangan dan perubahan personel sebagai upaya meningkatkan upaya penyelesaian konflik dan pengembalian perdamaian yang tak kunjung datang (DK PBB 2015).

Membahas kegagalan UNAMID maka hal pertama yang harus dibahas adalah pelaksanaan mandat, mandat UNAMID terbagi dalam lima komponen yang terkait dengan proses perdamaian di Darfur, keamanan, aturan hukum, pemerintah, hak asasi manusia, dan bantuan kemanusiaan, DK PBB membentuk kelima komponen ini menjadi empat tolak ukur yang menjadi landasan mandat UNAMID, adapaun kegagalan-kegagalan UNAMID dalam memenuhi tolak ukur mandatnya adalah (Prinsloo & Niekerks 2017), (1) Kegagalan dalam Memperoleh Solusi Politik yang Komprehensif, DDPD yang disponsori UNAMID sebagai solusi politik di Darfur menjadi perjanjian perdamaian yang gagal, (2) Gagal dalam Memastikan Lingkungan yang Aman dan Stabil, konflik hingga di tahun 2017 masih berjalan, serangan oleh RSF masih terjadi terutama di Jebel Marra, penggunaan senjata kimia pada warga sipil dalam serangan yang dilakukan pemerintah yang gagal diantisipasi UNAMID membuat penciptaan lingkungan yang aman dan stabil tidak terlaksana, (3) Kegagalan Meningkatkan Aturan Hukum, Pemerintahan dan Hak Asasi Manusia di Darfur, UNAMID ditolak di dalam *nyala special court*, ditolak aksesnya di penjara dan sentral detensi di Darfur Utara, UNAMID juga gagal dalam melindungi HAM warga, kegagalan dalam mengusut pemerkosaan masal Tabit dan kasus penculikan warga sipil yang terjadi di depan mata UNAMID menjadi bukti gagalnya UNAMID melindungi warga Darfur, (4) Gagal dalam Menstabilkan Situasi Kemanusiaan dengan masih banyaknya IDP yang tidak bisa kembali ke tempat tinggalnya, IDP juga menyebar keluar batas negara hingga ke Chad.

Misi *hybrid* yang bersifat multidimensional biasanya dicirikan salah satunya oleh DDR atau *Disarmament, Demobilization, Reintegration* mantan kombatan, dalam misi UNAMID di Darfur sendiri DDR ini tidak terlaksana dengan baik dan dianggap sebagai *Political Fraud* dari Pemerintah Sudan, dengan pelaksanaan DDR hanya terjadi pada kelompok pemberontak dan warga Darfur, tidak pada Janjaweed yang merupakan militan pendukung pemerintah (All Africa 2017).

Pertanyaan yang selalu muncul ketika membahas pengadaan misi perdamaian PBB adalah tujuan diadakannya misi ini, apakah benar-benar murni untuk menciptakan kedamaian atau terdapat agenda-agenda kepentingan negara dibalikinya, konsep kepentingan negara dijelaskan dalam Realisme yang menyatakan bahwa kunci dari *statecraft* adalah kepentingan nasional, konsep ini menekankan pada pandangan realist mengenai moral politik, realisme juga memberi tekanan normatif bahwa kebijakan yang diambil negara harus selalu mengejar kepentingan negaranya (Heywood 2011).

Membahas kepentingan negara yang ada dalam UNAMID, kepentingan ini juga ditinjau dari tiga negara pengirim pasukan terbanyak di UNAMID yaitu Nigeria, Rwanda, dan Mesir, seperti yang Neack (1995) sampaikan bahwa pengadaan PKO pastilah berhubungan dengan kepentingan negara dibalik partisipasinya maka ketiga negara ini memang memiliki kepentingan dibalik pengirim pasukannya dalam UNAMID, (1) Nigeria memiliki kepentingan ekonomi dan politik dengan menggunakan US yang melobi mereka untuk bergabung dalam UNAMID dengan gantinya US akan membantu pengurangan hutang Nigeria pada *Paris Club* (Henkei 2016), (2) Rwanda sendiri berpartisipasi di UNAMID dikarenakan 'beban moral', dengan masa lalu negaranya yang pernah terjadi Genosida dan gagal diatasi oleh komunitas Internasional, Rwanda merasa bahwa keadaan di Darfur harus dibantu penyelesaiannya (Ruwangga 2013), (3) Mesir memiliki kepentingan *hydropolitic* dengan Pemerintah Sudan terkait aliran sungai Nil, sehingga bergabungnya Mesir dalam UNAMID juga sembari meyakinkan Al-Bashir bahwa Mesir tidak akan menekan Pemerintah Sudan terkait Darfur (CBC News 2007).

Neack (1995) menuliskan mengenai negara-negara yang berpartisipasi dalam *peacekeeping operations* untuk mempertahankan status quo dan memperoleh *prestige* dari kontribusi mereka menjaga perdamaian negara, PBB memiliki *image* sebagai organisasi dunia yang menjaga kestabilan dan keharmonisan dunia, bahkan awal dari pembentukan organisasi ini adalah untuk mencegah kembali terjadinya perang di dunia sekaligus mengembalikan kedamaian internasional, ketika konflik di Darfur menyeruak dan AMIS terbukti gagal mengatasinya semua mata akan tertuju pada PBB dengan ekspektasi besar bahwa PBB akan maju menyelesaikan konflik di Darfur, reputasi PBB tentu saja dipertaruhkan disini. Kurangnya agenda yang menjadikan kurangnya *political will* dalam menjaga perdamaian di Darfur juga disebutkan oleh Lijn (2010) bahwa faktor kegagalan UNAMID salah satunya adalah kurang tegasnya DK PBB mengusut konflik Darfur.

Seperti yang Realist katakan bahwa negara adalah aktor utama di dalam dunia politik internasional menggunakan PKO sebagai alat untuk mencapai kepentingan mereka, keberadaan UNAMID di Darfur yang diturunkan oleh DK PBB dengan persetujuan kelima negara pemegang hak vetonya tentu saja bukan sebuah misi kebetulan, dari berbagai konflik di dunia, Darfur menjadi salah satu wilayah yang dipilih untuk diturunkan misi perdamaian, dan ini bukanlah suatu kebetulan semata, Prinsloo & Niekerks (2017), juga menekankan kurangnya dukungan DK PBB dalam kasus Darfur dimana kelima negara pemegang hak veto sibuk mengejar kepentingannya masing-masing di Sudan tanpa memperhatikan keadaan kemanusiaan yang memburuk di Darfur, Prinsloo & Niekerks 2017 menunjuk Rusia dan Cina sebagai penyebab utama kurangnya *political will* PBB di Darfur, ditenggarai bahwa Rusia dan Cina menggunakan kekuatan vetonya di DK PBB untuk memblokade sanksi yang kuat pada Sudan.

Alasan Rusia sendiri untuk melindungi pemerintah Sudan seperti yang sudah sempat disebutkan sebelumnya terkait suplai senjata dari Rusia yang digunakan oleh pemerintah Sudan dalam konflik, Pemerintah Sudan dilaporkan menggunakan Mi-24 yang merupakan helikopter keluaran Russian Air Force yang digunakan sebagai transport dan senjata tempur di sekitar wilayah Darfur, Rusia juga menjadi suplier pesawat tempur Sudan yang digunakan untuk membombardir desa-desa di Darfur, Rusia menyediakan jet tempur MIG-29 dan mendirikan pabrik tank T-72 di Khartoum (Prinsloo & Niekerks 2017). Hubungan baik Rusia-Sudan ini bahkan terpampang nyata ketika Al Bashir mengunjungi Putin pada November 2017 dengan agenda membahas kerja sama di antara dua negara ini dalam bidang ekonomi dan militer, kunjungan ini tentu memicu kontroversi, Al Bashir sampai pada 2017 berstatus sebagai tersangka kejahatan kemanusiaan yang dikeluarkan oleh ICC, Rusia dengan senang hati menerima kedatangan Al Bashir di Moscow dan tidak menyentuh bahasan Darfur sama sekali makin menguatkan fakta bahwa Rusia berada di pihak Pemerintah Sudan (Al Jazeera 2017).

Selain Rusia, Cina juga menjadi negara yang disebut-sebut melemahkan DK PBB di Darfur, Cina sendiri sama dengan Rusia, memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Sudan, Cina mengundang Al-Bashir berkunjung ke Beijing pada 2011 yang mengundang pertanyaan besar dari publik internasional, Cina sendiri berdalih bahwa Cina memiliki 'opini tersendiri' terhadap keputusan ICC dan menekankan bahwa Cina bukanlah negara yang menandatangani ICC (BBC 2011). Jika Rusia memiliki kepentingan sebagai suplier senjata di Sudan, Cina memiliki kepentingan seputar minyak dan kontrak bangunan, Cina dikabarkan memiliki investasi sebesar 3 Miliar USD dalam sektor minyak Sudan, bahkan Cina secara terang-terangan menyampaikan dukungan bagi Pemerintah Sudan dengan memberikan dukungan senjata, dan menghapuskan isolasi ekonomi Sudan, dalam DK PBB sendiri Cina sempat melakukan abstain dalam *voting* yang berhubungan dengan Darfur dan pemberian sanksi kepada Sudan atas kejahatan kemanusiaan yang dikakukan pemerintah Sudan di Darfur (Prinsloo & Niekerks 2017).

Kesimpulan

Kegagalan-kegagalan UNAMID dibuktikan lewat gagalnya UNAMID memenuhi tolak ukur mandat mereka. Adapun penyebab kegagalan UNAMID dalam penelitian ini dijawab menggunakan teori Realisme bahwa segala perilaku atau keputusan yang dibuat negara berhubungan dengan kepentingan negara tersebut, adanya PKO dan negara-negara yang terlibat dibaliknya sudah pasti memiliki tujuan atau kepentingan yang hendak dicapai melalui PKO tersebut, UNAMID terbentuk bukan karena *collective security* ataupun karena keprihatinan akan keadaan kemanusiaan di Darfur, UNAMID terbentuk karena kepentingan-kepentingan politik bagi PBB dan negara anggotanya, seperti *prestige* dan ajang menjaga *image* karena kasus Darfur mulai disorot oleh internasional yang membuat PBB juga menjadi sorotan dan mendapat tekanan moral untuk melakukan misi di Darfur.

Kepentingan negara-negara anggota DK PBB di Darfur juga menjadi penyebab utama gagalnya misi ini, misi UNAMID gagal karena kurangnya *political will* PBB dalam menerapkan kebijakan dan sanksi yang tegas di Darfur hal ini berkaitan dengan Rusia dan Cina yang memiliki kepentingannya masing-masing sehingga kerap menjegal adanya kebijakan yang tegas untuk mengusut Pemerintah Sudan agar berhenti menekan Darfur, sedangkan negara DK PBB lainnya seperti US, UK, dan Perancis, memilih untuk mengabaikan kasus Darfur dan membiarkan Cina dan Rusia menjegal kedamaian di Darfur, ketiga negara ini tidak peduli dengan Darfur karena mereka tidak memiliki kepentingan yang kuat dari membela Darfur, walaupun kemanusiaan di Darfur adalah hal yang patut dibela.

Referensi

Adenauer, NL 2006, 'Crisis in Darfur-The Forgotten Genocide. Konrad Adenauer Stiftung Washington, Washington.

All Africa 2017, *'Sudan: 'Darfur Disarmament Campaign Is Political Fraud' – Analyst*, dilihat pada 23 September 2018,

<https://allafrica.com/stories/201708250653.html>

Amnesty Internasional USA 2009, *Conflict Analysis*, dilihat pada 9 Oktober 2016,

<http://www.eyesondarfur.org/conflict.html>

Heywood, A 2011, *Global Politics*, Palgrave Macmillan, Basingstroke.

Human Rights Watch 2015, *Men With No Mercy*, dilihat pada 1 November,

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/sudan0915_insert_lowres_with_c_over.pdf

International Coalition for the Responsibility to Protect 2014, *Crisis in Darfur*, dilihat pada 9 Oktober 2016,

<http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-darfur>

Lijn, JVD 2010, *To Paint the Nile Blue: The Success and Failures of UNMIS and UNAMID*, Netherlands Institute of International Relations Clingendael, Den Haag.

Neack, L 1995, 'UN Peace-Keeping: In the Interest of Community or Self?', *Journal of Peace Research* 32(2):181{196}.

Prinsloo, B, Niekerk, V & Dewald 2017, *Hybrid Peacekeeping and the United Nations: The Case of UNAMID*, Routledge Part of Taylor & Francis Group, London.

United Nations 2015, *Prioritizing Civilian Protection, Drawdown Benchmarks, Security Council Adopts Resolution 2228 (2015) Renewing Mandate of Darfur Mission until 30 June 2016*, dilihat pada 28 Juni 2018,
< <https://www.un.org/press/en/2015/sc11951.doc.htm> >